

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori–Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adhi Setyo Prabowo. *Analisis Yuridis Peletakan Sita pada Sita Khusus Pidana pada KUHP dan Sita Umum pada UUK-PKPU*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Simbur Cahaya
- Ali Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Waka*. Bandung, Penerbit Alumni
- Andi Hamzah. 1986. *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Cetakan ke-2*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Waluyo, 2017. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- H. R. S. Effendy, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya.
- Hamzah Hatrik. 1995. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hanafi, 1997, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia.
- Lexy J Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Nasir. 2005. *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta: Djambatan.
- Mukti Arto. 2015. *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Munir Fuady, Munir Fuady. 2002. *Hukum Pailit*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT.

Citra Aditya Bakti.

Ratna Nurul Afiah, 1988. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Penerbit Aksara Baru.

Setiyono. 2005. *Kejahatan korporasi: analisis viktimologi dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia*: Bayumedia Publishing.

Siti Anisah. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia studi Putusan-Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Total Media.

Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sutan Remy Sjahdeni, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Penerbit Grafitipers.

Wildan Suyuthi. 2004 *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta: PT Tatanusa.

Wirjono Prodjodikoro, 2005. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama

WEBSITE

CNBC. *Jokowi sahkan KUHP Baru yang jadi undang undang.* diakses pada 28 januari 2023 pukul 14.25

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103100247-4402317/jokowi-sahkan-kuhp-yang-baru-jadi-uu-ada-37-bab-624-pasal>

Detikcom. *Bos First Travel didakwa pencucian uang.*

<https://news.detik.com/berita/d-3874362/bos-first-travel-didakwa-pencucian-uang-ini-modus-yang-digunakan> (Diakses pada 1 Mei 2023, Pukul 13.14)

Detikcom. *Geger pencucian uang Rp 905 miliar Jemaah umrah first travel.*

<https://news.detik.com/berita/d-4424125/akhir-geger-pencucian-uang-rp-905-miliar-jemaah-umrah-first-travel> (Diakses pada 1 Mei 2023 pukul 14.10)

Detikcom. *Sengkaot hukum kasus first travel.* <https://news.detik.com/kolom/d-4797157/sengkarut-hukum-kasus-first-travel>

(Diakses pada 1 Mei 2023 Pukul 14.20)

Kompascom. *First travel awal berdiri lakukan penipuan hingga akhirnya*

tumbang. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukanpenipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all#page4>.

(Diakses pada 1 Mei 2023, Pukul 14.17)

Kumparancom. *Tumbangnya first travel*. <https://kumparan.com/wisnu-prasetyo/kronologi-tumbangnya-first-travel> (Diakses pada 1 Mei 2023 Pukul 14.00)

JURNAL

Febrianti Syafitri. Perlindungan Hukum Terhadap Korban First Travel Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VII, Nomor 2, Juli-Desember 2020.

Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999.

Mahrus Ali. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. *Jurnal hukum no. 2 volume*. 18 april 2011.

Siti Hapsah Isfardiyana, "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016.

Sujayadi dan Yuniarti. Pelaksanaan Sita Jaminan dalam Hukum Acara Arbitrase. *Yuridika Vol 25 Nomor 3*, 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*), *Staatsblad* 1847, Pasal 1131

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Pasal 42 ayat (1) KUHAP)).

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), Pasal 1 angka 1

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN. DPK

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 195/PID/2018/PT BDG

Putusan Kasasi Nomor 3096K/Pid.Sus/2018

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365PK/Pid.Sus/2022